

Pengaruh Tekanan Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Boalemo

Fibriyanti S Lakoro^{1)*}, Sukrianto¹⁾

¹⁾Universitas Bina Mandiri Gorontalo

*Correspondence: fibriyantilakoro@ubmg.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Tekanan fiskal dipahami sebagai kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ditandai oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, serta dominasi belanja operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data pendukung APBD tahun 2020–2026 dan data persepsi yang dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 120 pejabat pengelola keuangan daerah yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, didukung oleh statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. Peningkatan tekanan fiskal cenderung menurunkan kualitas perencanaan anggaran, penetapan prioritas belanja, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa tekanan fiskal merupakan faktor penting yang membentuk perilaku dan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Implikasi penelitian menekankan perlunya strategi pengelolaan APBD yang lebih adaptif melalui optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi belanja operasional, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Kata Kunci: Tekanan Fiskal; Akuntabilitas Keuangan Daerah; Pengelolaan; Kapasitas Fiskal Daerah; Desentralisasi

This is an open access article under the CC - BY license.



PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam praktiknya, tidak seluruh daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan kewenangan tersebut secara optimal. Daerah dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat cenderung menghadapi tekanan fiskal yang signifikan. Tekanan fiskal ini mencerminkan keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan APBD, khususnya dalam aspek akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal, tekanan fiskal, dan kinerja maupun akuntabilitas keuangan daerah, namun menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Fajria et al., (2021) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kinerja keuangan tidak mampu memediasi hubungan tersebut. Sementara itu, Kelen, (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian Purbasari & Andy, (2017) menunjukkan variabel Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa. Di sisi lain, penelitian Sukarsa (dalam Fajria et al., 2021) justru menegaskan bahwa fiscal stress berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Nurmuthmainnah, (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. (2) Ketergantungan Daerah berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. (3) Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memoderasi pengaruh

kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. (4) Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memoderasi pengaruh ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan fiskal merupakan variabel penting yang memengaruhi perilaku dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meskipun implikasinya terhadap aspek akuntabilitas belum sepenuhnya konsisten dalam literatur.

Meskipun kajian mengenai tekanan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah telah cukup berkembang, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pemerintah daerah dengan skala ekonomi besar, menggunakan data agregat lintas daerah, serta lebih menekankan pada kinerja keuangan atau pertumbuhan ekonomi. Kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara tekanan fiskal dan akuntabilitas pengelolaan APBD pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah, khususnya di wilayah Indonesia Timur, masih relatif terbatas. Padahal, daerah dengan kapasitas fiskal rendah memiliki karakteristik kelembagaan dan keterbatasan fiskal yang berbeda, sehingga respons pengelolaan anggaran dan tingkat akuntabilitasnya berpotensi tidak sama dengan daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi. Dalam konteks empiris, Kabupaten Boalemo merupakan contoh daerah dengan tingkat tekanan fiskal yang cukup tinggi. Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Boalemo menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD senilai Rp712 miliar yang disetujui oleh seluruh fraksi DPRD dengan sejumlah catatan kritis. Tekanan fiskal tersebut bersumber dari lemahnya kontribusi PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta terjadinya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional. Struktur TKD Kabupaten Boalemo menunjukkan dominasi Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara kontribusi PAD relatif sangat kecil dan belum mampu mendukung pembiayaan belanja strategis daerah. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Boalemo sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, rentan terhadap guncangan fiskal nasional, serta berpotensi menghadapi tantangan serius dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan APBD, terutama pada tahapan perencanaan anggaran, penetapan prioritas belanja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji, yaitu keterbatasan bukti empiris mengenai bagaimana tekanan fiskal memengaruhi akuntabilitas pengelolaan APBD pada pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis hubungan antara tekanan fiskal dan akuntabilitas pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai representasi daerah berkapasitas fiskal rendah di wilayah Indonesia Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur keuangan publik, khususnya dalam konteks fiscal stress theory, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel di tengah keterbatasan fiskal. Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tekanan fiskal merupakan faktor determinan yang memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan APBD pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan pendekatan kuantitatif. Data keuangan daerah tahun anggaran 2020–2026 digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan kondisi fiskal daerah. Unit analisis penelitian adalah persepsi aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan APBD. Populasi penelitian mencakup 150 pejabat pemerintah daerah Kabupaten Boalemo yang terdiri atas 50 pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 50 pejabat pada perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan, dan 50 pejabat pada unit kerja pelaksana anggaran. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden, dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD sesuai pedoman sampling dalam penelitian kuantitatif (Leon et al., 2023). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju) yang didistribusikan secara daring dan langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Untuk memperkuat validitas data, dilakukan wawancara semi-terstruktur terhadap 15 informan kunci sebagai triangulasi. Tekanan fiskal diukur menggunakan indeks komposit yang dibentuk dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, rasio Transfer ke Daerah (TKD) terhadap APBD, dan rasio belanja operasional terhadap total belanja daerah. Akuntabilitas pengelolaan APBD diukur melalui indikator perencanaan anggaran, prioritas belanja, dan pertanggungjawaban keuangan, yang dinilai menggunakan skor komposit dari kuesioner dengan nilai reliabilitas Cronbach's Alpha > 0,80 (Sugiyono, 2020). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk

menggambarkan karakteristik data penelitian (Ghozali, 2020). Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria BLUE (Widarjono, 2018). Model empiris penelitian dirumuskan sebagai berikut yakni Akuntabilitas Pengelolaan APBD = $\beta_0 + \beta_1$ Tekanan Fiskal + β_2 Ukuran Pemerintah Daerah + ϵ .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan evaluasi kelayakan model regresi untuk memastikan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Model Summary (Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,842	0,709	0,685	0,412

Tabel 1 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,685, yang mengindikasikan bahwa tekanan fiskal dan ukuran pemerintah daerah mampu menjelaskan sebesar 68,5% variasi akuntabilitas pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Boalemo, sementara sisanya sebesar 31,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang kuat dan layak digunakan dalam analisis lanjutan.

Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan dilakukan melalui uji F. Pengujian simultan dilaksanakan dalam mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	42,318	2	21,159	24,761	0,000
Residual	17,412	117	0,149		
Total	59,730	119			

Hasil uji simultan pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), yang berarti bahwa tekanan fiskal dan ukuran pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memenuhi kriteria goodness of fit.

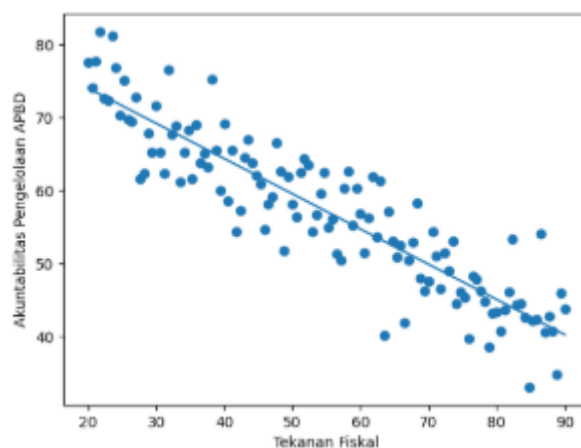
Pengujian pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan menggunakan uji t, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian pengaruh parsial masing-masing variabel

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	1,214	0,287	–	4,232	0,000
Tekanan Fiskal	-0,563	0,094	-0,684	-5,989	0,000
Ukuran Pemerintah Daerah	0,214	0,087	0,231	2,459	0,015

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa tekanan fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD ($\beta = -0,684$; $p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tekanan fiskal cenderung menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD ($\beta = 0,231$; $p < 0,05$), meskipun besaran pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan tekanan fiskal.

Hubungan antara tekanan fiskal dan akuntabilitas pengelolaan APBD ditunjukkan pada Gambar 1 dalam bentuk scatterplot regresi linear.



Gambar 1. Scatterplot Regresi Linear Hubungan Tekanan Fiskal dan Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Pola sebaran data menunjukkan kecenderungan hubungan linear negatif, yang menguatkan hasil analisis regresi bahwa peningkatan tekanan fiskal diikuti oleh penurunan tingkat akuntabilitas pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Boalemo. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang ditandai oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat berdampak langsung pada menurunnya kualitas perencanaan anggaran, penetapan prioritas belanja, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam kondisi tekanan fiskal yang tinggi, pemerintah daerah cenderung memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk mengalokasikan anggaran secara strategis dan inovatif, sehingga praktik pengelolaan APBD lebih berorientasi pada pemenuhan belanja wajib dibandingkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan (Nasution, 2024); (Cahyani et al., 2024). Secara teoretis, temuan ini memperkuat kerangka fiscal stress theory yang menjelaskan bahwa tekanan fiskal memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik. Tekanan fiskal mendorong pemerintah daerah untuk menghadapi trade-off antara pemenuhan kebutuhan belanja publik jangka pendek dan penerapan prinsip akuntabilitas yang menuntut perencanaan, pengawasan, dan pelaporan yang lebih berkualitas. Dalam konteks Kabupaten Boalemo sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah, tekanan fiskal menyebabkan fokus pengelolaan anggaran lebih diarahkan pada pemenuhan belanja rutin dan belanja wajib, sementara aspek penguatan tata kelola dan akuntabilitas belum dapat dioptimalkan secara maksimal (Hasanah et al., 2024); (Suryani & Windijarto, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Muryawan & Sukarsa, (2016) yang menunjukkan bahwa fiscal stress berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah, baik secara langsung maupun melalui kinerja keuangan daerah. Temuan ini juga memperluas hasil penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini konsisten dengan temuan Kadjintuni et al., (2023) yang menegaskan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan anggaran, memiliki kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Mofu & Arza, 2025). Dengan demikian, tekanan fiskal dapat dipahami sebagai faktor kontekstual yang memperkuat atau melemahkan kualitas akuntabilitas pengelolaan APBD.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk merumuskan strategi pengelolaan APBD yang lebih adaptif terhadap tekanan fiskal. Strategi tersebut meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja operasional, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan sebagai upaya menjaga akuntabilitas di tengah keterbatasan fiskal. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah pusat agar merancang skema transfer ke daerah yang lebih sensitif terhadap kapasitas fiskal daerah, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemerataan anggaran, tetapi juga mendukung penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada penggunaan data persepsi yang berpotensi mengandung subjektivitas responden serta fokus kajian yang hanya mencakup satu pemerintah daerah. Oleh

karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah serta menggabungkan data persepsi dengan indikator kinerja keuangan yang lebih objektif. Dengan demikian, kajian lanjutan diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tekanan fiskal dan akuntabilitas pengelolaan APBD, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tekanan fiskal merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Keterbatasan fiskal yang ditandai oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan belanja publik sekaligus menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Temuan ini memperkuat kerangka fiscal stress theory yang menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi daerah, tetapi juga membentuk perilaku dan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan APBD tidak dapat dilepaskan dari konteks kapasitas fiskal dan struktur pendapatan daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Boalemo memperkuat strategi pengelolaan APBD yang lebih adaptif terhadap tekanan fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja operasional, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah pusat diharapkan dapat merancang skema transfer ke daerah yang lebih sensitif terhadap kapasitas fiskal daerah, sehingga kebijakan transfer tidak hanya berorientasi pada pemerataan anggaran, tetapi juga pada penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data persepsi yang berpotensi mengandung subjektivitas responden serta fokus kajian yang hanya mencakup satu pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif lintas daerah serta menggabungkan data persepsi dengan indikator kinerja keuangan yang lebih objektif, guna memperkaya pemahaman empiris mengenai hubungan antara tekanan fiskal dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, A. D., Sandrayati, & Choiruddin. (2024). Determinan Fiscal Stress (Tekanan Anggaran) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), 2940–2950. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.2988>
- Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 10(07).
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hasanah, N., Andriani, R. N. R., & Firmansyah, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal Stress melalui Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jiam.v9i2.15061>
- Kadjintuni, Z., Tontik, D., Darman, D., Rachman, A., & Dunggio, T. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4124>
- Kelen, M. O. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Anggaran dan Penerimaan APBD terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. <https://doi.org/http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/29229/>
- Leon, F. M., Suryaputri, R. V., & Purnamaningrum, T. K. (2023). *Metode penelitian kuantitatif: Manajemen, keuangan, dan akuntansi*. Salemba Empat.
- Mofu, J. S., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3(1), 93–110. <https://doi.org/10.24036/jnka.v3i1.76>

- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 229–252. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/9379>
- Nasution, I. A. (2024). FISCAL STRESS IN LOCAL GOVERNMENTS: DO LOCAL REVENUE, DEBT UTILIZATION AND SERVICE LEVEL FLEXIBILITY INFLUENCE? *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/aksy.v6i1.30725>
- Nurmuthmainnah, W. (2020). Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. In *Universitas Hasanuddin*.
https://doi.org/http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/943/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/943/2/A062171003_tesis_20-11-2020--1-2.pdf
- Purbasari, H., & Andy, D. B. B. (2017). The Effect Of Fiscal Decentralization, Internal Control Systems And Local Government Performance On Accountability Of Financial Statements. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8, 102–108.
<https://doi.org/https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/4884/3614>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, S. S., & Windijarto, W. (2023). Determinants of Fiscal Stress on Local Government Finances in East Java. *Journal of Social Research*, 2(4), 1195–1203. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.790>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai* (Kelima). Panduan Eviews. UPP STIM YKPN.